

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 definisi perbankan yaitu, Lembaga usaha yang mengumpulkan dana masyarakat berbentuk simpanan, kemudian disalurkan kembali pada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Menurut Apriani Simatupang dkk (2021) Kegiatan utama Bank menghimpun dana dari masyarakat juga bank mempunyai beberapa fasilitas yang diberikan untuk masyarakat, salah satu fasilitasnya yaitu berupa pinjaman kredit. Bisa disimpulkan jika bank mempunyai peranan penting bagi masyarakat terutama berupa pinjaman kredit.

Dalam Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 terdapat definisi kredit yaitu, tersedianya uang atau tagihan yang sama, atas dasar persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dan diwajibkan pihak pinjam untuk membayar kembali hutangnya dengan kurun waktu disertai bunga. Jika dilihat dari sisi bank, kredit merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan bank. Penyaluran kredit yang lancar dapat memajukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Terdapat 3 tujuan penggunaan kredit yaitu kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Kredit konsumtif dibuat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dan keperluannya digunakan untuk individu (Ismail, 2018:100). Kebutuhan yang tergolong konsumtif sebagai contoh membeli rumah dengan dana dari bank atau yang biasa disebut dengan KPR (Safitri dan Tasman, 2021). Sebelum memberikan fasilitas kredit, bank wajib melakukan penilaian kredit karena bank harus yakin bahwa kredit tersebut nantinya akan kembali. Penilaian yang digunakan bank yaitu analisis 5C (Nopijantoro dkk, 2020:43).

KPR dapat menjadi peluang bisnis yang sangat diincar oleh bank dikarenakan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah tiap tahunnya semakin meningkat, selain itu terdapat juga persaingan yang kompetitif antar bank dalam menyalurkan KPR. Tugas bank dalam proses jual beli terjadi jika pembeli belum bisa

menyediakan dana sesuai dengan harga rumah yang dijual, sehingga cukup menyediakan uang muka dan sisanya dapat diangsur perbulan sesuai dengan batas waktu KPR (Simatupang dkk, 2021).

Industri perbankan dibandingkan dengan sektor usaha lainnya memiliki risiko yang tinggi. Risiko adalah konsekuensi yang dapat menyebabkan kerugian terjadi akibat dari adanya suatu peristiwa tertentu yang bisa membuat perusahaan rugi (Safitri dan Tasman, 2021). Dalam perbankan terdapat 8 jenis risiko, risiko kredit adalah risiko paling besar ditanggung bank. Risiko kredit terjadi karena debitur tidak mampu untuk membayar kewajiban secara tepat waktu sebagaimana sudah adanya persyaratan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan kredit. Secara umum risiko kredit dapat bersifat jangka pendek yaitu risiko yang ada terjadi karena ketidakmampuan debitur untuk memenuhi dan menyelesaikan tanggung jawab, namun hanya bersifat jangka pendek atau sementara terutama untuk kewajiban likuiditas dan risiko kredit yang bersifat jangka panjang yaitu risiko yang ada karena debitur tidak mampu menyelesaikan kewajiban yang bersifat jangka panjang biasanya disebabkan adanya wanprestasi. Selain itu, dalam kredit juga dikenal istilah risiko gagal bayar atau kredit macet atas sejumlah pemberian kredit sesuai dengan kurun waktu yang sudah ditentukan (Musdholifah dkk, 2019:97). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bank Umum, manajemen risiko merupakan kumpulan metodologi dan metode yang dipakai dalam identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang muncul dari semua kegiatan usaha bank. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang memadai, serta manajemen risiko yang komprehensif merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko kredit serta sistem pengendalian internal dan sistem informasi manajemen risiko.

Dalam menerapkan manajemen risiko, setiap bank memiliki cara dan strategi masing-masing. Bersumber pada *Annual Report* Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, meskipun ada di masa pandemi Covid-19, tetap membuktikan sebagai perusahaan perbankan yang sehat dan terpercaya. Bisnis Bank

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tetap tumbuh positif disamping itu juga mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi selepas pandemi Covid-19.

Tabel I.1 Portofolio Kredit Bank bjb.

Divisi	2021		2020		Pertumbuhan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Konsumer	45,304	47.19%	43,471	48%	1,833	4.22%
Ritel	17,186	17.90%	17,03	48%	155,895	0.92%
KKM	19,259	20.06%	15,769	17.58%	3,49	22.13%
KPR	7,731	8.05%	6,749	7.53%	982,909	14.56%
BPR dan LKM	2,927	3.05%	3,556	3.97%	-628,31	(167%)
UMKM	3,1	3.23%	2,599	2.90%	501,387	19.29%
Internasional	500	0.52%	500	0.56%	-	0.00%
Total	96,00	100%	89,67	100%	6,335	7.06%

Sumber: *Annual Report 2021* Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

Dalam *Annual Report 2021* Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, menunjukkan jika kredit konsumtif tetap mengungguli portofolio kredit. Komposisi portofolio kredit yang paling tinggi berasal dari kredit konsumen yang mencapai 47,19% dari total penyaluran kredit pada Bank bjb dikarenakan pada masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya memakai fasilitas kredit konsumen untuk penambahan modal usaha, pembelian alat-alat rumah tangga, ataupun kebutuhan konsumtif lainnya. Komposisi portofolio kredit KPR terdapat pada peringkat ke empat yang mencapai 8.05% dari total penyaluran kredit bank bjb. Kenaikan pendistribusian kredit KPR mencapai 14,56% dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 7,53%. Pencapaian signifikan ini ditopang dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Divisi KPR dan KKB sepanjang tahun 2021, diantaranya mengeluarkan produk bjb KPR Gaul, bjb KPR FLPP, bjb KPR Membumi, dan bjb KPR Green. Divisi KPR dan KKB secara berkelanjutan meningkatkan keunggulan kredit mulai dari bisnis proses dan dilaksanakan monitoring secara menerus. Dalam *Annual Report* Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Divisi KPR dan KKB per Desember 2021 tercatat memiliki 1.169 proyek kerjasama pengembang,

614 merupakan pengembang komersial, dan 555 adalah pengembang FLPP. Proyek ini tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik menyusun laporan Tugas Akhir dengan judul **“Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada KPR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten”**.

I.2. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan dari latar belakang diatas tujuan penulisan Tugas Akhir adalah untuk :

1. Untuk mengetahui proses Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada KPR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam meminimalisir tingkat *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

I.3. Manfaat Tugas Akhir

Manfaat penulisan laporan Tugas Akhir ini penulis memiliki 2 (dua) manfaat yang berbeda, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Bagi penulis dan pembaca, penulisan tugas akhir ini bisa digunakan untuk referensi yang bermanfaat sehingga bisa memberikan informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana proses Penerapan Manajemen Risiko Kredit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan bagaimana Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam meminimalisir tingkat *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

b. Manfaat Praktis

Bagi perusahaan hasil dari penulisan ini diharapkan dapat melihat sejauh mana penerapan manajaemen risiko kredit yang sudah berjalan dan bisa menjadi bahan evaluasi mengenai ke efektifan penerapan manajemen risiko kredit. Bagi nasabah bisa mendapatkan wawasan bagaimana manajemen risiko kredit

melaksanakan tugasnya dan bisa menjadi antisipasi terjadinya risiko kredit sebelum melakukan proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).